

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang menjadi dasar dari pokok permasalahan yang diamati dan studi terkait. Teori yang akan dibahas berkaitan dengan tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar (M2).

2.1. Landasan Teori

2.1.1. BI Rate Sebagai Suku Bunga Acuan

Pada Juli 2005 suku bunga secara resmi ditetapkan Bank Indonesia sebagai sasaran operasional pengendalian moneter yaitu suku bunga BI Rate (Bank Indonesia, 2020). BI Rate merupakan suku bunga acuan dengan menerapkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik (Bank Indonesia, 2016). Dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang dilaksanakan setiap bulan untuk menunjukkan perubahan BI Rate disampaikan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia, dan dilaksanakan pada operasi moneter melalui pengelolaan likuiditas (*Liquidity Management*) untuk mencapai sasaran kebijakan moneter.

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) merupakan sasaran kebijakan moneter dalam mencerminkan perkembangan suku bunga. Suku bunga PUAB akan mengalami pergerakan diikuti dengan perkembangan suku bunga deposito dan suku bunga kredit.

Terdapat faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan ketika Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga BI Rate dengan melihat inflasi yang diperkirakan melampaui target yang ditentukan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga BI Rate ketika melihat inflasi berada dibawah target yang sudah ditentukan (Berkas DPR, 2016).

2.1.2. Penetapan BI Rate

Menurut Berkas DPR (2016) saat menetapkan sikap atau *stance* kebijakan moneter melalui mekanisme Rapat Dewan Gubernur dilakukan setiap bulan dengan mencakup materi bulanan yaitu :

1. Penetapan respon sikap atau *stance* kebijakan moneter yang berlaku sampai Rapat Dewan Gubernur berikutnya.
2. Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) harus melakukan pertimbangan kebijakan moneter (*Lag of Monetary Policy*) yang berpengaruh terhadap inflasi.
3. Ketika terjadi perkembangan diluar perkiraan yang sudah ditetapkan, sikap atau *stance* kebijakan moneter dapat dilakukan sebelum dilaksanakan Rapat Dewan Gubernur bulanan yaitu pada Rapat Dewan Gubernur mingguan.

2.1.3. Perubahan BI Rate

Bank Indonesia untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter memperkenalkan suku bunga kebijakan baru yaitu *BI 7 Day Repo Rate (BI7DDR)* yang berlaku sejak 19 Agustus 2016. Hal ini dilakukan agar *BI 7 Day Repo Rate* dapat

mempengaruhi pasar uang, sektor rill, dan perbankan secara lebih cepat. Oleh karena itu, kebijakan baru dalam memperkenalkan suku bunga ini tidak akan mengubah *stance* kebijakan moneter yang sudah dilaksanakan (Bank Indonesia, 2021).

Otoritas Jasa Keuangan (2019) mengatakan BI Rate digunakan Bank Indonesia sebagai suku bunga acuan dalam jangka waktu 1 tahun, sementara *BI 7 Day Repo Rate* memiliki jangka waktu yang lebih singkat yakni 7 hari. Lebih jelasnya bank umum akan menyimpan dana mereka di Bank Indonesia dalam jangka waktu 1 tahun, setelah 1 tahun bank umum dapat menarik dana mereka dan memperoleh bunga sesuai dengan presentase BI Rate yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, *BI 7 Day Repo Rate* mempermudah bank umum agar dapat menarik dana mereka di Bank Indonesia dalam kurun waktu 7 hari. Bank Indonesia seperti meminjam dana dari bank umum yang kemudian berjanji untuk dikembalikan setelah jangka waktu 7 hari, 14 hari dan seterusnya. Berdasarkan pandangan Bank Indonesia (2020) *BI 7 Day Repo Rate* memiliki tingkat bunga yang lebih rendah dari BI Rate karena jangka waktu penyimpanan yang singkat, sehingga semakin singkat jangka waktu dalam penyimpanan maka tingkat bunganya rendah. Saat ini BI Rate dan *BI 7 Day Repo Rate* tetap digunakan sebagai suku bunga acuan bersama.

Kondisi saat ini perubahan BI Rate dilakukan untuk menstabilkan perekonomian yang menurun akibat pandemi Covid-19. Mengingat kembali perubahan pada kenaikan BI Rate yang dilakukan Bank Indonesia akan mengakibatkan bank umum lebih memilih menyimpan dana mereka di Bank Indonesia. Maka bank umum

akan menaikkan suku bunga simpanan sehingga dapat mendorong masyarakat untuk menabung di bank, yang berdampak pada berkurangnya jumlah uang beredar. Perubahan turunnya BI Rate membuat bank umum enggan menyimpan dana mereka di Bank Indonesia, sehingga akan mengakibatkan jumlah uang beredar meningkat.

2.1.4. Teori Suku Bunga

Dalam teori klasik tabungan merupakan fungsi dari tingkat bunga, sedangkan bunga merupakan dana pinjaman (Nopirin, 1992: 70). Tingginya tingkat bunga akan membuat keinginan masyarakat semakin tinggi untuk menabung. Salah satu indikator untuk menentukan apakah nasabah ingin menabung atau melakukan investasi melalui tingkat bunga. Oleh karena itu, tingginya tingkat bunga akan berpengaruh terhadap dana yang ditawarkan. Menurut Nopirin (1992: 71) semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan dalam melakukan investasi akan semakin kecil karena pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya ketika mendapatkan keuntungan lebih besar dari pada tingkat bunga yang harus dibayarkan untuk dana investasi sebagai ongkos dalam penggunaan dana (*cost of capital*).

Menurut teori Keynes berbeda dengan teori Klasik, teori Keynes mengatakan tingkat bunga merupakan fenomena moneter, sehingga dalam pasar uang tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Teori Keynes yang terdapat dalam buku Otoritas Jasa Keuangan (2019: 19) terdapat 3 motif dalam masyarakat memegang uang yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Motif ini menjadi penyebab timbulnya permintaan uang disebut dengan *liquidity preference*.

Dalam teori ini bertujuan untuk menetapkan suku bunga serendah-rendahnya agar meningkatkan pengeluaran investasi sehingga investasi dapat meningkatkan kesempatan kerja. Tinggi rendahnya suku bunga dapat mempengaruhi tinggi rendahnya penawaran investasi.

2.2. Jumlah Uang Beredar

2.2.1. Pengertian Jumlah Uang Beredar

Dalam perekonomian suatu negara penting untuk membedakan antara mata uang dan uang beredar. Jumlah uang beredar memiliki makna yaitu mata uang yang beredar dalam suatu negara dan uang beredar dalam suatu negara. Penting untuk diketahui bahwa mata uang yang beredar dalam suatu negara adalah mata uang yang dikeluarkan Bank Indonesia kepada masyarakat dalam bentuk uang logam dan uang kertas disebut dengan uang kartal. Namun untuk uang beredar dalam suatu negara adalah semua jenis uang yang digunakan dan beredar dalam perekonomian suatu negara meliputi mata uang itu sendiri ditambah dengan uang giral. Jumlah uang beredar terbagi menjadi tiga pengertian yaitu dalam arti sempit (M1), dalam arti luas (M2), dan dalam arti lebih luas (M3) (Nopirin, 1992: 3).

2.2.1.1. Jumlah Uang Beredar Dalam Arti Sempit (M1)

Jumlah uang beredar dalam arti sempit diberi simbol M1, didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor domestik yaitu uang kartal (C) dan uang giral (D). M1 merupakan uang kertas dan uang logam ditambah dengan simpanan dalam bentuk *demand deposits* (Nopirin, 1992: 3).

$$M_1 = C + D \quad (2.1)$$

Dimana :

M_1 : Jumlah uang beredar dalam arti sempit

C : *Currency* (uang kartal : uang kertas dan uang logam)

D : *Demand Deposits* (uang giral : rekening koran atau giro)

Demand deposits hanya mencakup rekening koran atau giro milik nasabah yang disimpan bank dan belum digunakan untuk berbelanja. Jenis rekening koran yang tidak termasuk dalam definisi *demand deposits* yaitu saldo rekening koran milik pemerintah pada bank lain atau Bank Indonesia (Boediono, 1980: 4). Jumlah uang beredar M_1 (*narrow money*) adalah uang yang paling likuid, karena dalam proses membentuk uang kas dilakukan secara cepat tanpa disertai adanya kerugian nilai.

2.2.1.2. Jumlah Uang Beredar Dalam Arti Luas (M_2)

Pengertian jumlah uang beredar dalam arti luas (M_2) disebut dengan likuiditas perekonomian. Jumlah uang beredar (M_2) meliputi M_1 ditambah tabungan dan deposito berjangka (*time deposit*) pada bank-bank umum (Nopirin, 1992: 3).

$$M_2 = M_1 + TD + SD \quad (2.2)$$

Dimana :

M_1 : Jumlah uang beredar dalam arti sempit

M_2 : Jumlah uang beredar dalam arti luas

TD : Deposito berjangka (*time deposit*)

SD : Tabungan (*saving deposit*)

M2 terdiri dari deposito berjangka dan tabungan, sementara mata uang dollar tidak mencakup deposito berjangka dan tabungan (Boediono, 1980: 6). Likuiditas M2 lebih rendah karena mencakup deposito berjangka, sehingga dalam mencairkan uang membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 12 bulan. Ketika uang dapat dicairkan sebelum waktu yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan denda.

2.2.1.3. Jumlah Uang Beredar Dalam Arti Lebih Luas (M3)

Jumlah uang beredar M3 mencakup M2 ditambah saldo tabungan (SD) dan deposito berjangka (TD) pada lembaga-lembaga tabungan non bank (Nopirin, 1992: 3). Secara keseluruhan baik saldo tabungan atau deposito berjangka disebut dengan uang kuasi.

$$M_3 = M_2 + QM \quad (2.3)$$

Dimana :

QM : Uang kuasi

Semua Negara memiliki hak untuk memperjual belikan devisa secara bebas. Seperti Negara Indonesia terdapat perbedaan antara deposito berjangka dan tabungan dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dollar. Oleh karena itu, perbedaan antara M2 dan M3 masih belum jelas (Boediono, 1980: 6).

2.2.2. Teori-Teori Jumlah Uang Beredar

2.2.2.1. Teori Kuantitas Mengenai Uang

Dalam teori ini membahas tentang permintaan dan penawaran uang, dan interaksi yang sedang terjadi diantara keduanya. Teori ini berfokus pada hubungan antara jumlah uang beredar dengan nilai uang atau tingkat harga. Hubungan tersebut akan lebih dijelaskan melalui teori permintaan akan uang, sehingga saat terjadi perubahan penawaran uang maka secara tidak langsung akan berinteraksi dengan permintaan uang dengan hasil akhir akan menentukan nilai uang (Boediono, 1980: 17).

2.2.2.2. Teori Cambridge (Marshall Pigou)

Teori ini lebih fokus pada fungsi uang sebagai alat tukar yang sah, karena dalam kebutuhan masyarakat uang merupakan alat likuid untuk tujuan transaksi (Boediono, 1980: 24). Oleh karena itu, pemegang kekayaan dalam bentuk uang memiliki perbedaan dengan kekayaan lainnya karena uang bersifat likuid maka dapat dengan mudah digunakan sebagai alat transaksi.

Pada saat memegang kekayaan dalam bentuk uang akan timbul kerugian dari memegang uang yaitu dengan mengorbankan keuntungan dalam bentuk bunga andai kata menyimpan kekayaan dalam bentuk surat berharga. Teori Cambridge menitikberatkan untung rugi melalui hubungan permintaan akan uang dengan volume transaksi yang sudah direncanakan (Boediono 1980: 24).

2.2.2.3. Teori Keynes

Teori Keynes merupakan teori yang bersumber dari teori Cambridge, tetapi teori ini berbeda dengan teori moneter klasik lainnya. Perbedaan ini dapat dilihat dari penekanan fungsi uang sebagai *store of value*, bukan sebagai *means of exchange*. Oleh karena itu, Keynes lebih mengembangkan teori permintaan uang disebut dengan teori *referensi likuiditas (liquidity preference theory)*. Menurut Mishkin (2008: 191) teori ini menjelaskan tiga motif permintaan uang yaitu :

1. Motif Transaksi

Uang berfungsi sebagai alat tukar yang dapat digunakan untuk transaksi. Keynes berpendapat bahwa tingkat transaksi yang besar akan menentukan komponen permintaan uang, karena transaksi tersebut proporsional dengan pendapatan. Tujuan utama dalam motif transaksi adalah mendapatkan uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dihasilkan dari keahlian yang dimiliki.

2. Motif Berjaga-jaga

Motif ini bertujuan untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Seseorang tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dan diselesaikan dengan pengeluaran uang, sehingga seseorang harus berjaga-jaga dengan memiliki uang tunai. Kondisi seperti itu membuat seseorang berjaga-jaga dengan membawa uang atau simpanan yang mudah dicarikan.

3. Motif Spekulasi

Motif ini menunjukkan bahwa seseorang memegang uang untuk alat menyimpan kekayaan. Seseorang berusaha mendapatkan uang yang lebih banyak untuk dapat melakukan transaksi yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, Keynes percaya bahwa permintaan uang berhubungan dengan pendapatan. Akan tetapi Keynes berpendapat bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi uang sebagai alat penyimpan kekayaan yaitu uang dan obligasi.

2.3. Kebijakan Moneter

2.3.1. Mekanisme Kebijakan Moneter

Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (Bank Indonesia, 2021). Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan kegiatan dalam mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian suatu negara. Bank Indonesia terus berusaha melakukan kebijakan untuk mempercepat program PEN dengan melihat dinamika perekonomian dan dampaknya terhadap perekonomian dari waktu ke waktu. Fokus pemerintah saat ini adalah penanganan vaksinasi Covid-19 yang menjadi salah satu tujuan utama untuk pemulihan ekonomi di masa depan.

2.3.2. Definisi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan tugas yang harus dilakukan Bank Indonesia dalam mengendalikan jumlah uang yang akan mempengaruhi perekonomian di masyarakat. Menurut Nopirin (1992) untuk menjalankan kebijakan moneter Bank Indonesia memiliki tujuan untuk menstabilkan ekonomi diukur dengan kesempatan

kerja, kestabilan harga, dan neraca pembayaran. Apabila perekonomian suatu negara terganggu maka kebijakan moneter dapat digunakan untuk memulihkan atau tindakan stabilisasi. Peredaran jumlah uang di masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi peredaran uang yang ada di masyarakat. Kebijakan moneter terdiri dari dua kebijakan yaitu (Ambarani, 2015: 57)

1. Kebijakan Uang Ketat (*Tight Money Policy*) merupakan suatu kebijakan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar.
2. Kebijakan Uang Longgar (*Easy Money Policy*) merupakan kebijakan dengan tujuan untuk menambah jumlah uang beredar.

Kebijakan moneter merupakan penawaran uang dan tingkat bunga bank dilakukan oleh Bank Indonesia dan dibedakan menjadi dua bagian yaitu kualitatif dan kuantitatif (Abdullah, 2018: 72). Kebijakan moneter kualitatif merupakan tugas Bank Indonesia dalam mengawasi bank umum fokus pada kegiatan perbankan. Sementara dalam kebijakan moneter kuantitatif Bank Indonesia ikut campur tangan secara langsung untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan suku bunga dalam suatu perekonomian. Menurut Nopirin (1992: 45) terdapat instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Politik Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

Politik ini meliputi Bank Indonesia yang menjual dan membeli surat-surat berharga baik obligasi dan surat hutang negara. Tindakan ini akan

mempengaruhi dua hal, pertama dengan cara menaikkan cadangan bank umum yang berkaitan dengan transaksi. Ketika pembelian surat berharga Bank Indonesia akan menambah cadangan umum yang menjual surat berharga tersebut, sehingga dengan bertambahnya cadangan maka penambahan jumlah uang beredar melalui proses kredit dapat dilakukan oleh bank umum. Kedua, pembelian atau penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga yang berdampak pada suku bunga akibatnya suku bunga juga akan berpengaruh.

2. Politik Cadangan Minimum (*Reserves Requirements*)

Cadangan minimum yang disimpan Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga likuiditas bank. Ketika cadangan minimum diturunkan maka jumlah uang beredar akan meningkat berlaku sebaliknya ketika cadangan minimum dinaikkan sehingga jumlah uang beredar akan menurun.

3. Politik Diskonto (*Discount Policy*)

Bank umum harus membayar tindakan dari perubahan tingkat bunga dalam hal meminjam dana dari Bank Indonesia. Saat menaikkan diskonto, maka tarif untuk meminjam dana dari Bank Indonesia akan naik sehingga dapat mengurangi keinginan bank umum dalam meminjam kepada Bank Indonesia, oleh karena itu berdampak pada jumlah uang beredar berkurang.

4. *Margin Requirement*

Instrumen ini bertujuan membatasi penggunaan kartu kredit untuk pembelian surat berharga bersifat spekulatif, melalui transaksi surat berharga untuk menetapkan jumlah minimum kas *down payment*. Salah satu contoh ketika

margin requirement 80% saat masyarakat ingin membeli surat berharga harus membayar dengan cash dan sisanya akan meminjam pada bank.

5. *Moral Suasion*

Instrumen ini bertujuan mempengaruhi lembaga moneter yang bekerja dalam bidang moneter melalui pidato Gubernur Bank Sentral dengan harapan dapat bersikap sesuai yang dikehendaki oleh penguasa moneter.

2.4. Hubungan Antara Suku Bunga BI Rate dengan Jumlah Uang Beredar (M2)

Mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga dilakukan melalui kebijakan moneter yang ditentukan Bank Indonesia dengan cara mempengaruhi pasar uang (Sancaya, 2019). Suku bunga menjadi syarat bagi Bank Indonesia ketika melakukan pengetatan jumlah uang beredar. Apabila suku bunga BI Rate meningkat maka jumlah uang beredar akan mengalami penurunan, namun sebaliknya ketika suku bunga BI Rate menurun maka jumlah uang beredar akan meningkat.

Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah menerapkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF) yang diamanatkan oleh Undang-Undang (Bank Indonesia, 2020). Respon perkembangan ekonomi setelah terjadi krisis keuangan menunjukkan peran sektor keuangan semakin kuat, sehingga Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadil *flexible* ITF. Pemerintah berupaya memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui Bank Indonesia dengan menetapkan *BI 7-day Repo Rate* (BI7DRR) sebagai suku bunga acuan dengan tujuan untuk mempercepat transmisi kebijakan moneter (Bank

Indonesia, 2020). Mekanisme transmisi kebijakan moneter memerlukan waktu dalam merespon perubahan suku bunga dengan melihat kondisi perekonomian. Oleh karena itu, epektifitas dalam menjalankan transmisi kebijakan moneter dipengaruhi oleh sektor keuangan perbankan, dan kondisi eksternal.

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Alvyonita (2014) mengenai Analisis Kausalitas Antara BI Rate dengan Jumlah Uang Beredar di Indonesia, penelitian ini menggunakan data bulanan Januari 2010 hingga Desember 2012 di Indonesia. Memiliki tujuan untuk membuktikan apakah terdapat hubungan kausalitas antara variabel yang diteliti. Pengujian yang dilakukan yaitu menggunakan uji akar unit (*unit root test*), penentuan panjang lag, uji kointegrasi, uji kausalitas *granger* dan model VAR. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan kausalitas antar variabel yang diteliti yaitu BI Rate mempengaruhi perubahan M1 dan M1 mempengaruhi perubahan presentase BI Rate sehingga terjadi hubungan timbal balik antara variabel yang diteliti.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Lapong *et al.* (2016) mengenai Analisis Kausalitas Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI Rate) di Indonesia Periode 2009.1 hingga 2015.4. Penelitian ini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) dengan waktu penelitian menggunakan data kuartalan tahun 2009.1 hingga 2015.4. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Granger Causality Test* untuk mengetahui apakah terdapat hubungan timbal balik antara jumlah uang beredar dengan BI Rate. Metode yang

digunakan yaitu uji stasioneritas, penentuan *lag optimum*, dan uji *granger causality*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah terdapat hubungan kausalitas dua arah atau timbal balik antara jumlah uang beredar dan BI Rate. Ini berarti, ketika terjadi perubahan maka akan mempengaruhi variabel yang lain.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Anwar (2018) mengenai Analisis Hubungan Kausalitas Antara Jumlah Uang Beredar, Bi Rate dan Inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data bulanan tahun Januari 2010 hingga Desember 2016, variabel jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) dan BI Rate, menggunakan data sekunder dalam bentuk *time series* atau runtut waktu. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar M1 dengan BI Rate dan inflasi periode Januari 2010 hingga Desember 2016. Model dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji stasioneritas, penentuan panjang lag, uji kointegrasi, dan uji kasualitas *granger*. Hasil penelitian menunjukkan variabel JUB dan BI Rate tidak terdapat hubungan kausalitas baik dua arah maupun satu arah, sedangkan untuk variabel JUB dan inflasi tidak terdapat hubungan kausalitas dua arah atau satu arah karena nilai probabilitas lebih besar dari alpha. Selanjutnya, untuk variabel BI Rate dan inflasi menunjukkan terjadi hubungan kasualitas satu arah dimana perubahan BI Rate menyebabkan perubahan inflasi.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Murdiah (2020) mengenai Analisis Kausalitas antara Investasi, Pendapatan Nasional, dan Jumlah Uang Beredar. Penelitian ini menggunakan data sekunder pada periode 2007.1 hingga 2015.4 dengan bentuk deret

waktu kwartal, dan variabel yang digunakan adalah pendapatan nasional, investasi, dan jumlah uang beredar. Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membuktikan ada tidaknya hubungan kausalitas dua arah antar variabel dengan pembuktian menggunakan metode uji *Granger causality*. Langkah pengujian dalam penelitian ini yaitu uji stasioneritas data, uji *lag optimal*, uji kointegrasi, dan uji *Granger causality*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan kausalitas dua arah antara variabel pendapatan nasional dan investasi, sedangkan untuk variabel pendapatan nasional dan jumlah uang beredar menunjukkan adanya hubungan kausalitas dua arah atau timbal balik. Selanjutnya variabel investasi dan jumlah uang beredar menunjukkan tidak terdapat hubungan kausalitas baik dua arah maupun satu arah.

